

ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN TANGKAP DI KABUPATEN CILACAP

Oleh :

Christiawan Hendratmoko dan Hidup Marsudi
Dosen Tetap STIE Surakarta

ABSTRACT

The aims of this research are to analyze the power of fisherman, evaluated by economic and non economic aspect, to analyze the performance of fishing by R/C ratio, to analyze the role of stakeholders in increasing fisherman's income, and to formulate the strategy of empowerment for fisherman. Primary data populated from 100 respondents in South Cilacap Area. The analysis methods used are descriptive statistics, crosstab analysis, and analysis of process hierarchy. The results of study indicate that the powers of fisherman are still less, they have low level income with R/C ratio 1,17. The roles of stakeholders toward coastal area community are still poor. So we need strategy to empower them by giving loan (credit), reviving the fisherman's organization, and giving information about good fishing.

Keywords: the power of fisherman; stakeholders; R/C ratio

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Persepsi demikian didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap realitas kehidupan masyarakat nelayan atau melalui pemahaman terhadap hasil-hasil kajian akademis. Keterbelakangan sosial ekonomi pada masyarakat pesisir merupakan hambatan potensial bagi mereka untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya sering terjadi kelemahan bargaining position dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2006). Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih tertinggal antara lain keadaan sumberdaya alam yang semakin menipis, kurangnya budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga, serta struktur ekonomi atau tata niaga yang belum kondusif bagi kemajuan dan kemakmuran nelayan (Rokhmin Dahuri dan Rais Ginting, 2001).

Masyarakat pesisir (nelayan) dapat dikelompokkan menjadi: (1) nelayan penangkap ikan (anak buah kapal dan pemilik); (2) petambak/pembudidaya; (3) pengolah hasil laut; dan (4) pedagang hasil laut (Susilowati, dkk., 2004). Umumnya permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir di Indonesia tidak berbeda dengan persoalan yang dijumpai pada kegiatan ekonomi skala kecil lainnya. Mereka hidup dalam segala keterbatasan. Keterbatasan ekonomi tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Sebagian besar nelayan masih hidup

di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$ 10 per kapita setiap bulan. Rata-rata pendapatan per kapita nelayan perikanan laut Jawa Tengah tahun 2003 sebesar Rp 894.112 (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, 2005). Jika dilihat dalam konteks pencapaian MDG (*Millenium Development Goals*) dari Bank Dunia, pendapatan sebesar itu termasuk kategori *extreme poverty*. Keterbatasan sosial di mana nelayan tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan kelembagaan sosial lainnya. Keterbatasan politik karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi dalam peran pengambilan keputusan (Ary Wahyono, 2001). Di samping keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi, dan lain sebagainya.

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan dengan luas 225.360,843 Ha merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah (Cilacap Dalam Angka, 2006). Dari 24 kecamatan, 12 di antaranya berada dalam wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 201,9 km (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2006). Di Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi volume produksi perikanan laut paling tinggi, yaitu sebesar 7.616 ton (88,84%) dengan nilai produksi Rp 78.929.726 (87,11%). Melihat keadaan tersebut, maka Cilacap memiliki andil dalam potensi perikanan laut di Jawa Tengah sebagai peluang yang layak untuk terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya ikan. Selain itu, Kabupaten Cilacap memiliki 3.277 unit rumah tangga perikanan laut (jumlah tertinggi di antara kabupaten di Pesisir Selatan). Banyaknya rumah tangga perikanan laut diharapkan mampu produktif sehingga berdampak pada volume produksi perikanan yang juga tinggi.

Masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Persepsi demikian didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap realitas kehidupan masyarakat nelayan atau melalui pemahaman terhadap hasil-hasil kajian akademis. Keterbelakangan sosial ekonomi pada masyarakat pesisir merupakan hambatan potensial bagi mereka untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya sering terjadi kelemahan *bargaining position* dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2006). Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih tertinggal antara lain keadaan sumberdaya alam yang semakin menipis, kurangnya budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga, serta struktur ekonomi atau tata niaga yang belum kondusif bagi kemajuan dan kemakmuran nelayan (Rokhmin Dahuri dan Rais Ginting, 2001).

Karakteristik sosial masyarakat pesisir di atas menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah. Seiring dengan belum berfungsinya atau belum adanya kelembagaan sosial masyarakat maka upaya kolektif untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah juga menjadi terhambat. Keadaan ini berpengaruh besar terhadap lambannya arus perubahan sosial ekonomi yang terjadi di kawasan pesisir, sehingga dinamika

pembangunan wilayah menjadi terganggu. Situasi *involutif* pembangunan wilayah yang demikian sangat terasa di desa-desa nelayan yang terpencil dan memiliki keterbatasan sarana-prasarana pembangunan.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam upaya membangun masyarakat pesisir agar potensi pembangunan dapat dikelola dengan baik adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM, dengan jalan memperluas wawasan pembangunan dan ketrampilan ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui strategi ini masyarakat secara kolektif mempunyai kemampuan optimal dalam membangun wilayahnya.

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan dengan luas 225.360,843 Ha merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah (Cilacap Dalam Angka, 2006). Dari 24 kecamatan, 12 di antaranya berada dalam wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 201,9 km (Dinas Perikanan dan Kelautan, 2006). Di Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi volume produksi perikanan laut paling tinggi, yaitu sebesar 7.616 ton (88,84%) dengan nilai produksi Rp 78.929.726 (87,11%). Melihat keadaan tersebut, maka Cilacap memiliki andil dalam potensi perikanan laut di Jawa Tengah sebagai peluang yang layak untuk terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya ikan. Selain itu, Kabupaten Cilacap memiliki 3.277 unit rumah tangga perikanan laut (jumlah tertinggi di antara kabupaten di Pesisir Selatan). Banyaknya rumah tangga perikanan laut diharapkan mampu produktif sehingga berdampak pada volume produksi perikanan yang juga tinggi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan

Pembangunan adalah proses alami mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai akibat hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses alami di atas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku ekonomi bertindak rasional (*efficient*), dapat dipenuhi. Namun demikian, dalam realitas asumsi-asumsi di atas sangat sulit dipenuhi. Pasar seringkali tidak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumberdaya alam sedemikian rupa sehingga tak mampu berada pada kondisi *full employment*.

Tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi juga sangat beragam. Kondisi di atas diperburuk oleh kenyataan bahwa tidak setiap pelaku ekonomi mendasarkan perilaku pasarnya atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomi telah terdistorsi. Dalam jangka panjang hal tersebut akan melahirkan masalah-masalah pembangunan, seperti kesenjangan, pengangguran, dan akhirnya kemiskinan. Di tengah kondisi *distortif* tersebut, proses natural dalam pembangunan tidak dapat terjadi begitu saja. Proses natural harus diciptakan melalui intervensi pemerintah, dengan kebijakan-

kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsi di atas.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab. *Pertama*, pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur. *Kedua*, pembangunan perlu diposisikan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. *Ketiga*, pembangunan perlu ditempatkan pada arah koordinasi lintas sektor yang mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam implementasinya, usaha untuk menjawab ketiga arah pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan sistematis. Pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dapat bersinergi dengan upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan (Friedmann, 1992). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah gejala kegagalan dan harapan. Dengan demikian, “pemberdayaan masyarakat”, pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Friedmann, 1992).

Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun, Friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan (Hall, 1995). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi, namun juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992).

Konsep *empowerment* merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran implementasi. Pada tataran ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*. Pada tataran implementasi, interaksi akan terjadi melalui pertarungan antar otonomi (Friedmann, 1992). Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Mubyarto, 1997).

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*), dan tahap selanjutnya adalah pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community-driven development*). Perlu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain nilai fisik di atas, ada juga nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia, yaitu kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun juga secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan Negara (*public policies*) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang kondusif.

Community-Driven Development

Pemberdayaan dengan berbagai bentuk modelnya diterapkan untuk memberdayakan orang, masyarakat, dan organisasi, termasuk memberdayakan organisasi pemerintah. Salah satu yang dapat membantu untuk mengaplikasikan konsep pemberdayaan dalam bahasa teknis adalah konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community-driven development*). Berkenaan dengan kepentingan tersebut, diperlukan beberapa pemahaman konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat yang meliputi (1) kedekatan hubungan antara konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat dan tujuan-tujuan penanggulangan

kemiskinan secara lokal maupun nasional; dan (2) definisi model-model pemberdayaan masyarakat yang paling sesuai dengan kondisi local dengan merujuk pada pembangunan yang digerakkan masyarakat sebagai konsep besarnya (*grand concept*).

Community-driven development didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan sebanyak mungkin sumberdaya setempat. Pendekatan konsep ini telah diperkenalkan oleh lembaga-lembaga donor, terutama Bank Dunia, dalam mengoperasionalkan program-program bantuan luar negeri di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Pendekatan konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat sesungguhnya telah membawa nilai-nilai baru yang coba diintroduksikan ke masyarakat Indonesia yang telah memiliki nilai-nilai lokal sendiri. Apabila nilai-nilai yang dibawa harmonis dengan nilai-nilai lokal, kemungkinan tidak akan menimbulkan masalah baru. Namun, jika ternyata ada perbedaan, maka dapat menyebabkan gesekan nilai sehingga berpotensi melahirkan konflik lokal. Hal ini harus diwaspadai, yaitu dengan menggagas dua persoalan besar dalam penerapan konsep tersebut, yakni (1) persoalan kesesuaian konsep pembangunan yang dibawa dengan nilai-nilai lokal, dan (2) persoalan manfaat konsep yang akan diaplikasikan dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertama, kesesuaian konsep pembangunan dengan nilai-nilai lokal. Pendekatan *community-driven development* bukan satu-satunya konsep pemberdayaan masyarakat karena ada berbagai variasi dalam penerapan program pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kriteria konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat. Jadi diperlukan modifikasi dan cara pandang baru untuk memberdayakan masyarakat.

Kedua, manfaat konsep pembangunan untuk mewujudkan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan. Jika dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang didefinisikan sebagai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, penerapan konsep *community-driven development* harusnya mampu menjembatani proses penanggulangan kemiskinan sehingga sampai pada tujuan upaya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Tidak ada manfaatnya menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan jika masyarakat miskin sendiri tidak bisa terentaskan dari kondisi kemiskinan yang dialaminya.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun fondasi *civil society* di kawasan pesisir (Kusnadi, 2007). Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

Tujuan pemberdayaan di atas dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat, dan kebijakan atau strategi

pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2006); a) potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan; b) pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka; c) negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir; d) Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman; e) Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara kepulauan Republik Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut : *Pertama* adalah asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan; *Kedua* adalah asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat masyarakat di kawasan pesisir. *Ketiga* adalah asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

Sinergi ketiga asas di atas dalam praktek sosial pemberdayaan diharapkan memberikan kontribusi besar untuk (a) membangun kemandirian masyarakat nelayan, (b) meningkatkan *bargaining position* terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan kawasan, (c) memperkuat akses ekonomi-politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan (d) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian keempat hal tersebut akan menjadi tiang utama untuk mewujudkan konstruksi *civil society* dalam transformasi masyarakat yang demokratis dan pemerintahan lokal yang bersih (*clean local government*).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain,

seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam konteks kerja sama lintas pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Nelayan

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Sesungguhnya, nelayan bukanlah entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Menurut Mulyadi (2005), berdasarkan pemilikan alat tangkap, nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sedangkan nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Sementara itu, menurut Susilowati, dkk (2004), nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan tangkap, nelayan budidaya/tambak, nelayan pengolah, dan nelayan pedagang.

Masyarakat nelayan kita masih dianggap sebagai figur masyarakat yang paling lengkap kekurangannya, belum mengenal budaya-budaya modern seperti menabung untuk memperbaiki sarana prasarana kehidupannya. Ditambah dengan tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang minim, dan perumahan yang memprihatinkan. Fenomena yang muncul kemudian bagi masyarakat nelayan adalah ketidakberdayaan, kemiskinan, lingkungan yang kumuh, serta komunitas kelompok marginal.

Umumnya nelayan hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan ekonomi tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Keterbatasan sosial di mana nelayan tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan kelembagaan sosial lainnya. Keterbatasan politik karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi dalam peran pengambilan keputusan. Di samping keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi, dan lain sebagainya.

Revenue and Cost Ratio (R/C Ratio)

R/C ratio atau rasio penerimaan dan biaya produksi merupakan salah satu indikator evaluasi usaha dalam kegiatan produksi. Berikut ini diuraikan secara

ringkas pengertian dari penerimaan dan biaya produksi beserta komponennya yang termasuk dalam usaha perikanan. Penerimaan Total (*Total Revenue - TR*) merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima produsen dari hasil penjualan produk yang dihasilkannya (Suryawati, tanpa tahun). Menurut Riyanto (1998) dalam Misbah Sururi (2004), penerimaan pada unit penangkapan ikan adalah hasil penjualan ikan yang diperoleh selama operasi penangkapan ikan. Begitu juga pada usaha pengolahan, penerimaan yang didapat adalah hasil penjualan ikan olahan Terdapat dua konsep laba (Panayotou, 1985) : a) Laba operasi atau laba kotor adalah Selisih antara penerimaan total dengan biaya operasi/biaya variabel ($TR - VC$), b) Laba bersih adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total ($TR - TC$).

Pada umumnya, pendapatan nelayan penggarap ditentukan secara bagi hasil dan jarang menggunakan sistem gaji/upah. Dalam sistem bagi hasil, bagian yang dibagi ialah pendapatan setelah dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah dengan ongkos penjualan hasil. Pada sistem ini yang dibagi adalah hasil penjualan ikan yang diperoleh. Caranya ialah ikan hasil tangkapan satu unit penangkapan dijual oleh pemilik kemudian barulah dilakukan perhitungan bagi hasil (Mulyadi, 2005).

Biaya produksi merupakan faktor utama untuk menentukan berapa jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan di pasar. Dalam analisis ekonomi, biaya produksi merupakan nilai dari sumberdaya yang dipakai dalam proses produksi (Suryawati, tanpa tahun). Sedangkan dalam Gilarso (2003), biaya adalah semua pengorbanan yang perlu untuk suatu proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku.

Keadaan ekonomi usaha nelayan dapat ditelaah berdasarkan analisis mikro ekonomi. Satuan usaha nelayan disebut satu unit penangkap. Untuk usaha perikanan besar yang mempunyai beberapa unit penangkap, analisis tersebut didasarkan unit usaha. Nilai asset tetap/tidak bergerak dalam satu unit penangkap disebut sebagai modal. Pada umumnya, untuk satu unit penangkap modal terdiri dari: alat-alat penangkapan, boat/sampan penangkap, alat-alat pengolahan/pengawet di dalam kapal, dan alat-alat pengangkutan laut (*carrier*).

Penilaian terhadap modal usaha nelayan dapat dihitung dengan tiga cara. *Pertama*, penilaian didasarkan pada nilai alat-alat yang baru, yaitu berapa ongkos memperoleh alat-alat tersebut menurut harga yang berlaku saat ini. Jadi dengan mengetahui jenis alat dan jumlahnya beserta harganya yang baru, dapat dihitung nilai modal sekarang. *Kedua*, berdasarkan harga pembelian atau pembuatan alat-alat, jadi berapa nilai investasi awal yang telah dilakukan nelayan, bertolak dari sini, dengan memperhitungkan penyusutan tiap tahun, dapat dihitung nilai alat-alat atau modal pada waktu sekarang. Cara kedua ini dilakukan jika nelayan membeli alat-alat baru dan ingat harga pembeliannya. *Ketiga*, dengan menaksir nilai alat saat ini, yakni harga yang akan diterima apabila alat-alat dijual.

Bagi nelayan sering juga diperhitungkan modal, yaitu pengeluaran untuk perijinan boat dan penangkapan. Hal ini dilakukan karena pengeluaran tersebut hanya dilakukan sekali dan tidak setiap tahun. Dalam penghitungan modal atas pengeluaran tersebut, pengeluaran ini belum dihitung karena belum jelas apakah termasuk modal atau biaya. Biaya produksi dalam usaha nelayan terdiri dari dua

kategori (Mulyadi, 2005): a) Biaya nyata (*actuil cost*) yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh nelayan yang terdiri dari 1) Pengeluaran kontan, seperti : bahan bakar dan oli, bahan pengawet (es dan garam), bekal makanan awak kapal, biaya reparasi, dan pengeluaran untuk retribusi dan pajak. 2) Pengeluaran tidak kontan, berupa upah/gaji awak nelayan yang umumnya bersifat bagi hasil dan diberikan setelah hasil jual dan b) Biaya tidak nyata (*inputed cost*) berupa penyusutan dari boat/sampan, mesin-mesin dan alat penangkap. Pengeluaran ini hanya merupakan penilaian yang tidak pasti dan hanya merupakan taksiran kasar.

Wattanutchariya (1982), mengklasifikasikan biaya usaha nelayan dalam tiga komponen : a) Biaya variabel, yaitu pengeluaran yang benar-benar dibayar dan berubah-ubah sesuai jumlah ikan yang diproduksi, seperti : bahan bakar, bekal makanan, listrik, upah pekerja, dan obat-obatan, b) Biaya tetap, biaya yang terlepas dari operasi atau produksi seperti penyusutan alat tagkap/peralatan, c) Biaya oportunitas dari pemilik input, bisa variabel atau tetap, seperti : tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri, penggunaan tanah dan bunga dari modal tetap.

Analisis Hierarki Proses (AHP): Penyusunan Kriteria dan Alternatif

AHP adalah suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan, serta memungkinkan menguji kepekaan hasilnya (Saaty dalam Maarif et al., 2003). Dalam prosesnya, AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan. Di lain pihak, proses AHP memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dalam menangani setiap persoalan dengan AHP menuntut orang untuk menganggap gagasan, pertimbangan, dan fakta yang diterima orang lain sebagai aspek esensial dari masalah itu sendiri. Partisipasi kelompok dapat memberi kontribusi pada validitas hasil keseluruhan meski tidak memudahkan pelaksanaan jika pendapat saling berbeda jauh, sehingga orang dapat memasukkan ke dalam proses tersebut setiap informasi yang diperoleh baik secara ilmiah maupun secara intuitif.

Beberapa manfaat dari penggunaan metode AHP dapat disebutkan sebagai berikut: a) Memberikan satu model tunggal, mudah dimengerti dan fleksibel untuk berbagai persoalan yang tidak terstruktur, b) Memiliki sifat kompleksitas dan saling ketergantungan, dimana dalam memecahkan masalah dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem serta menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem, c) Elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat yang berbeda dan kelompok unsur yang serupa dalam setiap tingkat dapat disusun secara hierarki, d) Melalui penetapan berbagai prioritas dapat memberikan ukuran skala obyek dan konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan serta menuntun pada suatu taksiran menyeluruh kebaikan setiap alternatif, e) Memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuannya dan tidak memaksakan konsensus, tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda dan f) Memungkinkan untuk memperhalus definisi pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian melalui pengulangan.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data ini diambil melalui survai dengan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan terhadap responden, yaitu nelayan berkenaan dengan variabel penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga/dinas yang terkait dengan masalah penelitian.

Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel bagi nelayan dalam penelitian ini adalah *multistage sampling*, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I

Menentukan kecamatan pesisir sebagai tempat pengambilan sampel. Berdasarkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan oleh rumah tangga perikanan tangkap sebagian besar berada di Kecamatan Cilacap Selatan, maka kecamatan ini diambil sebagai lokasi penelitian. Kriteria tempat pengambilan sampel yang berdasarkan atas jumlah produksi ikan terbesar menjadi landasan pemilihan tempat pengambilan sampel.

Tahap II

Menentukan nelayan tangkap yang akan diambil sebagai sampel. Berdasarkan jenis alat tangkap yang dominan yang digunakan oleh rumah tangga perikanan tangkap sebagian besar nelayan menggunakan *gill nets*, maka nelayan yang memakai alat tangkap ini diambil sebagai sampel responden. Kriteria sampel yang berdasarkan atas jenis alat tangkap dominan menjadi landasan pemilihan sampel.

Tahap III

Menentukan jumlah sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara terkuota (*quoted sampling*), yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap *gill nets* dalam berproduksi ($n=100$) sebagai sampel. Dipilihnya sampel terkuota dengan alasan keterbatasan waktu penelitian dan kondisi di lapangan, terutama kapal yang memiliki lama operasi 4-7 hari, 15- 22 hari, bahkan 3-6 bulan. Data jumlah responden yang diperoleh sebanyak 80 orang di Kecamatan Cilacap Selatan yang meliputi pemilik kapal, juru mudi, dan ABK, sedangkan kekurangannya dipenuhi dengan cara meminta data dari pemilik kapal yang mempunyai lebih dari satu kapal, dengan mempertimbangkan variase tonase, dan nilai pendapatan. Data responden ditelusuri dengan cara *door to door*.

Metode Analisis

Metode tabulasi silang (*crosstab*)

Untuk mengetahui tingkat keberdayaan nelayan digunakan tabulasi silang antara indikator-indikator tingkat keberdayaan seperti akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi dengan jenis usaha responden. Berdasarkan tabulasi silang tersebut diperoleh hasil yang diukur

by rule of thumb. Apabila kurang dari 50 persen dari total responden nelayan untuk mendapatkan akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi (perbaikan teknik tangkap) berasal dari diri sendiri, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya rendah. Sebaliknya, jika lebih dari 50 persen dari total responden menjawab telah memanfaatkan sumber atau pihak lain untuk mendapatkan akses usaha, pasar, dan teknologi, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya tinggi. Analisis *crosstab* ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberdayaan nelayan dari indikator kemampuan lobi antara (1) punya/tidaknya responden atas akses dengan kenalan (*stakeholders*), (2) pernah minta tolong atau tidak dengan *stakeholders*, dan (3) berhasil atau tidak dalam meminta pertolongan tersebut. Apabila responden pernah meminta pertolongan maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau lobi dan apabila permintaan pertolongan tersebut berhasil maka berarti kemampuan lobi responden tinggi. Hal ini merupakan bentuk dari representasi diri dari responden atau dapat dikatakan bahwa tingkat keberdayaan mereka sudah tinggi.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat kuantitatif. Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (SPSS dan Mason et al, 1999). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui indikator sosial ekonomi seperti profil responden yang mencakup umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain (Indah Susilowati, 1997). Analisis ini juga dipakai untuk mengetahui gambaran umum dan kondisi usaha nelayan di daerah penelitian yang meliputi jumlah produksi, penerimaan total dan biaya total, serta keuntungan yang diperoleh. Sementara itu, untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam membantu dan mendukung usaha masyarakat pesisir menurut penilaian responden juga digunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan skala konvensional (1-10), berdasarkan nilai rata-ratanya yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Skala 1-5 menunjukkan nilai rendah
2. Skala 5-7 menunjukkan nilai sedang atau biasa-biasa saja
3. Skala 7-8 menunjukkan nilai cukup
4. Skala 8-10 menunjukkan nilai tinggi atau bagus

HASIL PENELITIAN

Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap responden di daerah penelitian, secara umum tingkat keberdayaan nelayan di Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah, baik untuk aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Melihat keadaan tersebut, diperlukan suatu strategi pemberdayaan yang tepat untuk membuat mereka lebih berdaya.

Selanjutnya, untuk aspek ekonomi yang meliputi akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran produk), dan akses teknologi (penyuluhan dan bantuan perbaikan teknik penangkapan ikan), sebagian besar responden nelayan (lebih dari 50%) mengaku tidak/belum pernah memperoleh kredit, mendapatkan informasi pasar, dan menerima penyuluhan/ bantuan teknik

penangkapan ikan. Sedangkan untuk aspek non ekonomi, yaitu politik (mewakili diri), sosial (kemampuan melakukan loby), dan budaya (keputusan berusaha), kurang dari 50% responden nelayan mengaku bahwa mereka tidak terbiasa mewakili diri, melakukan loby, dan keputusan berusaha berasal dari keluarga.

Tingkat keberdayaan nelayan di Kabupaten Cilacap dalam memperoleh akses usaha berupa kredit masih relatif rendah, terbukti hanya 44 orang atau sebesar 44 persen yang pernah memperoleh bantuan kredit. Tingkat keberdayaan yang rendah dari responden antara lain disebabkan oleh : (1) tidak berani mengaktualisasikan atau mewakili diri atau kelompok melalui berbagai prestasi dan ide-ide cemerlang ; (2) merasa tidak/belum perlu melakukan upaya peningkatan usaha (seperti: membuat inovasi produk, inovasi teknik penangkapan/pengolahan, mencari informasi pasar, dan lain-lain) ; dan (3) secara eksternal, belum adanya kepercayaan dari kreditor terhadap usaha mereka yang berskala kecil dan masih bersifat tradisional.

Responden nelayan dalam memanfaatkan akses informasi penawaran (supply) atas produk ikan yang ditangkap sebagian besar mereka harus mencari sendiri. Sebanyak 51 dari 100 (51 persen) harus mencari sendiri informasi penawaran produknya. Selain itu, informasi penawaran juga diperoleh melalui masukan dari konsumen/masyarakat, pasar, dan sesama nelayan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa teknik penangkapan ikan yang mereka lakukan adalah secara turun-temurun. Sebanyak 78 dari 100 responden (78 persen) masih menerapkan teknik penangkapan ikan secara turun-temurun hingga sekarang. Hanya sebagian kecil saja responden yang memperoleh informasi tentang teknik penangkapan ikan dari penyuluhan atau buku, yaitu sebanyak 13 responden.

Aspek Non Ekonomi

Survei di lapangan terhadap responden nelayan menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya, sebagian besar responden, yaitu 75 persen menjawab mereka sendiri yang mengambil keputusan dalam berusaha. Sedangkan sisanya mempertimbangkan pendapat keluarga atau teman dalam mengambil keputusan usaha. Khusus bagi nelayan yang mempertimbangkan pendapat keluarga dalam mengambil keputusan karena istri mereka ikut mempersiapkan bekal dalam melaut.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan dan keberanian untuk melakukan loby bagi para responden nelayan di daerah penelitian masih relatif kecil.

Kinerja Usaha

Berdasarkan survei di lapangan terhadap responden nelayan, diperoleh hasil bahwa kinerja usaha dari kegiatan produksi yang mereka lakukan sudah cukup efisien ($R/C = 1,17$). Responden dalam penelitian ini adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap berupa jaring gillnets sebanyak 100 orang yang berlokasi di Kecamatan Cilacap Selatan (lihat tabel 3.3). Nelayan di wilayah ini rata-rata berhasil mendapatkan tangkapan sebanyak 5.100,98 kg/trip. Jumlah dan jenis ikan yang berhasil ditangkap relatif bervariasi tergantung dari keadaan cuaca,

musim, kondisi mesin dan jaring, serta jenis armada kapal yang dipakai untuk melaut.

Peran *Stakeholders* Dalam Meningkatkan Usaha Nelayan Di Kabupaten Cilacap

Berdasarkan penilaian responden, nampak bahwa peran yang paling menonjol dalam setiap kegiatan usaha nelayan dan pengolah ikan mulai dari proses pengadaan faktor produksi hingga distribusi dan yang lainnya adalah peran dari pebisnis. Sedangkan peran dari *stakeholders* yang lain dinilai kurang memadai.

Aktivitas usaha yang didominasi oleh peran swasta (pebisnis) adalah pada pengadaan faktor produksi, distribusi, akses pasar, dan *networking* (lihat gambar 4.8). Pengadaan modal oleh swasta merupakan salah satu hal yang disorot oleh responden, dimana dianggap oleh mereka bahwa dalam menjalankan usaha banyak berhubungan dengan pihak swasta atau pengusaha.

Sebagian besar responden juga menilai bahwa pemerintah juga memiliki peranan yang besar dalam pengadaan sarana dan prasarana serta dalam inovasi teknologi jika dibandingkan dengan *stakeholders* lainnya (lihat gambar 5.11). Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah membangun banyak fasilitas di TPI yang diharapkan dapat membantu kelancaran usaha mereka. Pemerintah melakukan renovasi terhadap TPI PPNC dan beberapa TPI lain serta direncanakan akan dibangun sebuah pasar ikan higienis di Kecamatan Cilacap Selatan dan adanya bimbingan teknologi (bintek) bagi pengolah ikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pebisnis dan pemerintah mempunyai peran yang relatif besar dalam meningkatkan usaha nelayan di daerah penelitian. Sementara, peran dari *stakeholders* lain dianggap kurang memadai. Secara umum, peran *stakeholders* berdasarkan penilaian responden masih rendah karena nilai rata-rata untuk tiap aktivitas usaha di bawah 5.

Perumusan Strategi Pemberdayaan Untuk Nelayan Melalui AHP

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui prioritas dalam peningkatan keberdayaan nelayan dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pemberian kredit dan bantuan modal tanpa agunan oleh lembaga keuangan (0,268).
2. Pembentukan organisasi atau kelompok nelayan yang beranggotakan nelayan sendiri baik yang sebelumnya sudah pernah mendirikan kelompok namun tidak berkembang maupun yang benar-benar belum terbentuk (0,215).
3. Penyuluhan penangkapan ikan ramah lingkungan (0,145).
4. Pemberian bantuan pengadaan alat tangkap dengan cara kredit bergulir agar pemilikan alat tangkap bersifat kolektif (0,111).
5. Penyuluhan diversifikasi alat tangkap dan diversifikasi usaha disesuaikan dengan pergantian musim (0,070).
6. Ditetapkannya peraturan daerah mengenai aturan struktur bagi hasil antara nelayan juragan dengan nelayan buruh (0,063).
7. Pemberian hak pengelolaan wilayah laut di perairan masing-masing dari pemerintah kepada nelayan lokal (0,049).
8. Peningkatan peran TPI sebagai media yang membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan (0,044).

9. Peningkatan peran KUD sebagai penyedia kebutuhan nelayan dalam melaut (0,035).
10. Pelatihan terhadap anak buah kapal (0,029).
11. Bimbingan manajemen keuangan usaha secara sederhana (0,022).

SIMPULAN

Tingkat keberdayaan nelayan di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan masih rendah (*powerless*), baik dari aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya (kurang dari 50 persen) responden yang memiliki kemampuan memperoleh akses usaha, akses informasi pasar, akses teknologi, keputusan usaha dan kemampuan lobi. Secara lebih rinci, kemampuan akses usaha responden sebesar 44 persen pernah mendapatkan bantuan kredit. Akses informasi pasar sebesar 51% dan 28%, nelayan masih mencari sendiri informasi penawaran dan permintaan produknya. Sementara itu, untuk akses teknologi penangkapan, sebesar 78 persen responden masih menerapkan teknik penangkapan yang turun-temurun hingga sekarang. Sebesar 56 persen responden mengaku tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah dalam kaitannya dengan perbaikan teknik usaha.

Rata-rata pendapatan usaha kotor per trip yang didapatkan oleh nelayan sebesar Rp 6.793.874,31 dengan jumlah tangkapan rata-rata sebesar 5.100,98 kg/trip. Sementara itu, rasio penerimaan dan biaya (R/C ratio) per trip usaha penangkapan ikan oleh nelayan *gillnets* di daerah penelitian sebesar 1,17. Angka tersebut berarti bahwa usaha penangkapan ikan mampu memberikan pendapatan bagi nelayan, meskipun pendapatan itu harus dibagi antara nelayan juragan dengan nelayan buruh dengan perbandingan 50:50. Peran stakeholders dalam membantu meningkatkan usaha dinilai oleh responden masih kurang (skor nilai kurang dari 5). Dapat dikatakan bahwa pebisnis cukup memegang peran dalam pengadaan faktor produksi, akses pasar dan *networking* kepada responden. Sedangkan peran pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana usaha dinilai sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil *Analisis Hierarki Proses*, langkah utama yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan keberdayaan nelayan baik dari aspek ekonomi, politik, maupun sosial budaya adalah pemberian kredit dan bantuan modal tanpa agunan, pembentukan organisasi kelompok masyarakat pesisir, serta penyuluhan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan ekosistem sumberdaya laut.

Rekomendasi

1. Peningkatan peran dan kontribusi *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan KUD dalam rangka meningkatkan usaha nelayan yang sebagian besar belum mampu untuk melakukan aktualisasi diri/kelompoknya dan kemampuan lobi dengan pihak-pihak yang terkait dengan usaha mereka juga masih terbatas.
2. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diterapkan di daerah penelitian secara efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa agenda utama yang diperlukan untuk merealisasikan peningkatan keberdayaan nelayan adalah melalui (1) pemberian bantuan kredit tanpa agunan dan dasarnya

angsuran disesuaikan dengan siklus pendapatan masyarakat; (2) pembentukan organisasi atau kelompok nelayan sebagai wadah yang beranggotakan mereka sendiri baik yang sebelumnya pernah didirikan tapi tidak berkembang maupun yang benar-benar belum terbentuk agar mampu menampung segala permasalahan *krusial* yang dihadapi sekaligus sebagai wadah yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut; (3) sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan, dan proyek percontohan (usaha binaan) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E. dan Liviawaty, E. 2005. *Pengawetan dan Pengolahan Ikan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Ary Wahyono, dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- BPS. 2006. *Cilacap Dalam Angka*. BPS Kabupaten Cilacap.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. 2006. *Statistik Perikanan Tangkap*. Jawa Tengah, Semarang.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cilacap. 2006. *Profil Perikanan Kabupaten Cilacap*, Cilacap.
- Eva Meilian Sari. 2006. *Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelurahan Tegalsari Kota Tegal untuk Meningkatkan Pendapatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP (tidak dipublikasikan).
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Blackwell, Cambridge.
- Heruwati, E.S. 2002. *Pengolahan Ikan Secara Tradisional*. Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Hidayat, S. dan Samsulbahri, D. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. PT. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Irawan, A. 1997. *Pengawetan Ikan dan Hasil Perikanan*. CV. Aneka Solo.
- Iswahyudi. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Majalah Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. CV. Tiga Putra Jaya, Jakarta.
- Kusnadi. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. LKiS Yogyakarta.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Majalah Kelautan Dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Martasuganda, S. dkk. 2003. *Teknologi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Mason, Robert D, Douglas A. Lind, William G. Maschall. 1999. *Statistical Technique in Business and Economics*. McGraw Hill International Edition, London.
- Mayanggita Kirana. 2008. *Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan Di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Jawa Tengah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Cilacap)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP.

- Mubyarto (ed). 1997. *Kisah-kisah IDT, Penuturan 100 Sarjana Pendamping*, cetakan pertama, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nicholson, Walter. 2002. *Microeconomics Intermediate*. Erlangga, Jakarta.
- Nikijuluw. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan*. Feraco, Jakarta
- Panayotou, Theodore. 1985. *Cost Structure and Profitability of Small-Scale Fishing Operations: A Conceptual Framework*. International Development Research Centre.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant N. Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. ElexMedia Komputindo, Jakarta.
- Rifka Nur Anisah. 2007. *Analisis Tingkat Keberdayaan Pengolah Ikan yang Berorientasi Pasar (Studi Empiris di Kota Tegal)*. Tesis Magister Sumber Daya Pantai Fakultas Perikanan UNDIP.
- Riyanto. 1998. *Ekonomi Nelayan*. LkiS, Yogyakarta.
- Rokhmin Dahuri. 2004. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan*. LISPI, Jakarta.
- Saaty, T.L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin* (terjemahan: Liana Setiono) . PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Supriharyono, dkk. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutrisno. 1995. *Nelayan dan Kemiskinan*. Rajawali, Jakarta.
- Wattanuchariya, Sarun and Theodore Panayotou. 1982. *The Economics of Aquaculture: The Case of Catfish in Thailand*. Aquaculture Economics Research in Asia. International Development Research Centre.
- Wibowo, S. 1999. *Industri Pengasapan Ikan*. PT. Panebar Swadaya, Jakarta.
- Widodo, J. dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.